

LEMBAR PENGESAHAN NASKAH PUBLIKASI

SEBAGAI INSTRUMEN POLITIK LUAR NEGERI JEPANG

Naskah publikasi dengan judul :

**TOKYO INTERNATIONAL CONFERENCE ON AFRICAN DEVELOPMENT (TICAD)
SEBAGAI INSTRUMEN POLITIK LUAR NEGERI JEPANG**

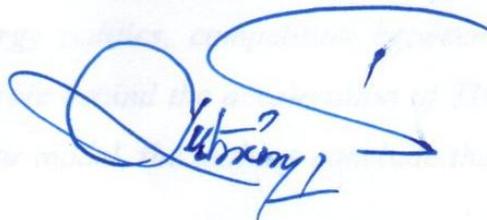
*(Tokyo International Conference On African Development (TICAD) As Japan's Instrument Of
Foreign Policy)*

Disusun Oleh :

NAUFALITA FATHIRRAHMA

20140510213

Yang Disetujui,



Grace Lestariana Wonoadi, S.IP., M.Si.

Dosen Pembimbing

**TOKYO INTERNATIONAL CONFERENCE ON AFRICAN DEVELOPMENT (TICAD)
SEBAGAI INSTRUMEN POLITIK LUAR NEGERI JEPANG**

*(Tokyo International Conference On African Development (TICAD) As Japan's Instrument Of
Foreign Policy)*

Naufalita Fathirrahma

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Email: naufalita19@gmail.com

Abstrak: Tulisan ini mencoba menganalisa alasan Jepang mempercepat pelaksanaan TICAD sejak tahun 2013. Politik energy, persaingan antar negara dan kepentingan nasional Jepang memegang peranan penting dibalik percepatan TICAD. Dengan menggunakan teori politik luar negeri dan model actor rasional, penulis menyimpulkan bahwa TICAD digunakan Jepang sebagai alat politik luar negerinya.

Kata Kunci: politik luar negeri Jepang, Afrika, TICAD

Abstract: This paper attempts to analyze the reasons for Japan to accelerate the implementation of TICAD since 2013. Energy politics, competition among countries and Japan's national interests play an important role behind the acceleration of TICAD. Using the theory of foreign policy and the rational actor model, the author conclude that Japan used TICAD as a tool of foreign policy.

Keywords: Japan's Foreign Policy, Africa, TICAD

PENDAHULUAN

Jepang merupakan salah satu negara dengan perekonomian terbaik di dunia. Perekonomiannya menguasai sektor perdagangan di dunia. Perekonomian Jepang saat ini berada di urutan ketiga dalam hal PDB nominal, sementara itu berada di posisi keempat saat membandingkan PDB dengan paritas daya beli (PPP). Pertumbuhan ekonomi sekitar 1 persen di tahun 2016 dan berlanjut menjadi sekitar 1,2 persen pada tahun 2017. Namun, diperkirakan masih di bawah 1 persen selama lima tahun ke depan. PDB nominal Jepang adalah US\$ 4,84 triliun, PDB (PPP) US\$ 5,42 triliun, dan PDB (PPP) per kapita adalah US\$ 42,860. (Bisnis Liputan 6, 2017)

Ekonomi raksasa Jepang ini telah dibangun sejak lama, ekonomi telah menjadi fokus utama Jepang sejak kekalahannya di perang dunia II. Sejak kekalahannya di perang dunia II, melalui “*Yoshida Doctrine*” yang dikeluarkan oleh Perdana Menteri Yoshida Shigeru, Jepang lebih mengutamakan pembangunan ekonomi daripada militer. (Riyanto, 2012)

“*Yoshida Doctrine*” tersebut merupakan tindak lanjut dari Pasal 9 Konstitusi Jepang yang merupakan perjanjian mengenai sikap anti-pasifis Jepang pasca kekalahan Jepang terhadap Amerika Serikat dan sekutunya di perang dunia II.

Perdagangan di bidang energy antara Jepang dengan negara-negara Afrika memang menjadi salah satu focus utama Jepang. Tercatat dalam sejarah, agresi militer Jepang yang dilakukan pada zaman perang dunia bertujuan untuk melakukan ekspansi pencarian sumber daya alam khususnya energi. Hubungan Jepang-Afrika tersebut lalu diwujudkan dalam kerjasama bilateral melalui *Tokyo International Conference On African Development* (TICAD). Pasca berakhirnya perang dingin antara dua blok besar di

dunia, Afrika dipandang tidak terlalu penting bagi peta geopolitik karena pasca kejatuhan Uni Soviet, wilayah yang dianggap penting bergeser dari Afrika ke Eropa Timur. Padahal pada saat perang dingin, Afrika merupakan wilayah yang penting. Pada saat yang sama, Amerika Serikat dan Eropa tidak terlalu massive dalam melakukan bantuan ekonomi akibat kelesuan ekonomi di negara mereka sendiri. Pada saat itulah Jepang masuk ke wilayah Afrika dan melakukan kerjasama karena menganggap itu sebagai peluang. (Japan Times, 2017)

PEMBAHASAN

TICAD

TICAD merupakan forum kerjasama antara Jepang-Afrika yang dimulai sejak tahun 1993. TICAD merupakan salah satu cara untuk mendorong dialog dengan negara-negara Afrika dan mempromosikan bantuan dan investasi. TICAD dilaksanakan setiap lima tahun sekali sejak tahun 1993, namun sejak tahun 2013 dikeluarkan kebijakan baru yaitu TICAD dilaksanakan setiap tiga tahun sekali. TICAD bertujuan untuk mempromosikan pembangunan, perdamaian dan keamanan Afrika, melalui penguatan hubungan dalam kerjasama dan kemitraan multilateral. TICAD telah terlaksana sebanyak enam kali sejak pertama kali didirikan pada tahun 1993, yakni tahun 1993, 1998, 2003, 2008, 2013 dan 2016. (United Nation, 2017)

Konferensi TICAD yang pertama diadakan di Jepang pada tahun 1993. TICAD pertama kali diadakan dengan tujuan untuk mendukung reformasi politik dan ekonomi Afrika serta membangkitkan perhatian masyarakat internasional terhadap Afrika. Melalui

"Tokyo Declaration on African Development" Jepang menyatakan sikap positifnya untuk mendukung pembangunan Afrika, dan pada saat yang sama meminta Afrika untuk melanjutkan swadaya, reformasi dan tata pemerintahan yang baik. (MOFA, 2017)

Setelah terlaksana selama puluhan tahun, TICAD telah berkontribusi banyak untuk Afrika, yang awalnya hanya fokus pada masalah ekonomi, seiring berjalannya waktu TICAD semakin memperluas bidang kemitraannya dengan Afrika. TICAD berkontribusi pada fasilitasi dan promosi dialog kebijakan tingkat tinggi antara para pemimpin Afrika dan mitra pembangunan Afrika mengenai isu-isu yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, perdagangan dan investasi, pembangunan berkelanjutan, keamanan manusia, perdamaian dan stabilitas dan pemerintahan.

TICAD VI yang dilaksanakan pada 27-28 Agustus 2016 di Nairobi, Kenya merupakan forum dialog komunikasi yang paling terakhir dilaksanakan. TICAD VI dihadiri oleh 52 negara, 74 organisasi internasional dan regional dan perwakilan dari aktor sektor privat maupun *civil society organization* baik dari Kenya maupun Jepang. TICAD VI terlaksana atas kerjasama antara pemerintah Jepang, *the United Nations Office of the Special Advisor on Africa* (UN-OSAA), *the United Nation Development Programme* (UNDP), *African Union Commission* (AUC) dan *the World Bank*. Fokus utama dalam TICAD VI ini adalah untuk mempromosikan *high-level policy* antara pemimpin Afrika dan aktor-aktor lain yang terlibat serta mendukung mobilisasi inisiasi pembangunan di Afrika. TICAD VI menghasilkan *The Nairobi Declaration*, *The Nairobi Implementation Plan* dan *Business Declaration*. (TICAD 6, 2017)

Terdapat beberapa perbedaan yang terjadi di TICAD VI dibanding dengan pelaksanaan TICAD selama ini, yaitu diantaranya TICAD VI hanya berselang tiga tahun

dari pelaksanaan TICAD V pada tahun 2008 mengingat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi yang cepat di benua ini.

Selain itu, Shinzo Abe selaku Perdana Menteri Jepang yang menjabat sejak 2012 membawa 1.000 orang perwakilan yang berasal dari sektor bisnis dan perusahaan multinasional. TICAD VI juga pertama kalinya dilaksanakan di Afrika setelah selama ini selalu dilaksanakan di Jepang. Perdana Menteri Jepang tersebut juga melakukan pertemuan satu persatu dengan para pemimpin Afrika.

Dalam pidatonya Shinzo Abe juga menyatakan bahwa langkahnya tersebut untuk membendung pengaruh China di Afrika. (Asia Nikkei, 2014) Sebagaimana yang dikatakan Abe dalam pidatonya *"also unveiled a new diplomatic strategy centered on "free and open" Pacific and Indian oceans an apparent bid to counter China's maritime advances. He said Japan wishes to make the two seas "peaceful seas that are governed by the rule of law."* (Asia Nikkei, 2017)

POLITIK LUAR NEGERI JEPANG.

Praktik politik luar negeri Jepang ini dimulai dari era Restorasi Meiji dimana pada saat itu Jepang memulai politik luar negerinya dengan cara mulai membuka pintu berhubungan dengan bangsa Barat. Pada awalnya Jepang menganut sistem politik tertutup dimana Jepang tidak berhubungan dengan bangsa lain. Namun pada saat terjadi pergantian kekuasaan ke Restorasi Meiji, Jepang mulai melakukan industrialisasi dan mulai membuka pintu untuk melakukan hubungan dengan bangsa Barat.

Dalam melaksanakan politik luar negerinya, suatu negara pastilah memiliki prinsip dasar atau pedoman umum yang dijadikan patokan dalam merumuskan setiap kebijakan politik luar negeri. Prinsip dasar politik luar negeri antara negara yang satu dengan negara

yang lain tentulah berbeda karena kepentingan nasional dan cara setiap negara untuk mewujudkan hal tersebut tentu berbeda pula. Demikian halnya dengan Jepang yang juga memiliki pedoman dasar dalam politik luar negerinya, pedoman dasar inilah yang dijadikan dasar dan tujuan oleh negara tersebut. Pedoman ini yang nantinya akan dijadikan landasan dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan politik luar negeri suatu negara. Prinsip dasar politik luar negeri Jepang yang dikutip dari Ministry Of Foreign Affairs (MOFA) antara lain:

1. Memperkuat posisi Jepang di mata dunia internasional khususnya untuk perekonomian yang stabil serta bersama masyarakat internasional menjaga perdamaian dan keamanan dunia sesuai dengan Konstitusi Jepang.
2. Melakukan kerjasama di bidang politik dan ekonomi untuk menghindari konflik.
3. Jepang harus berperan aktif dan perdamaian dan keamanan internasional dan menjadikan ekonomi sebagai kekuatannya.
4. Diplomasi sebagai cara untuk mewujudkan tujuan politik luar negeri. (MOFA, 2018)

Adapun disamping panduan dasar tersebut adapula tujuan yang ingin dicapai Jepang dari politik luar negerinya tersebut. Tujuan yang ingin dicapai Jepang antara lain (MOFA, 2018):

1. Mewujudkan perdamaian dan stabilitas keamanan di dunia khususnya di kawasan Asia.
2. Jepang berupaya untuk memimpin perekonomian dunia dengan ekonomi yang stabil.
3. Bersama International Energy Agency (IEA), Jepang berusaha memecahkan masalah energy dunia.

4. Bekerja sama dengan negara-negara berkembang.

Meskipun telah disebutkan dengan jelas focus utama politik luar negeri Jepang, namun tentu setiap pemimpin memiliki fokusnya masing-masing. Begitu pula dengan Perdana Menteri Shinzo Abe. Shinzo Abe memiliki beberapa focus dalam politik luar negerinya, yakni sebagai berikut:

1. Bersama meningkatkan nilai-nilai universal seperti demokrasi dan HAM.
2. Bekerja sama untuk menjamin kebijakan laut bebas dan tidak dengan ancaman militer dan menjaga objek vital.
3. Menjaga kemitraan ekonomi dengan meningkatkan kerja sama di bidang investasi dan revitalisasi perekonomian.
4. Kebudayaan yang bervariasi.
5. Menghidupkan kembali pertukaran anak muda. (Republika, 2018)

Selain prinsip-prinsip umum diatas, Shinzo Abe juga lebih memfokuskan Jepang pada perekonomian. Prinsip-prinsip Abenomics tersebut antara lain:

1. Meningkatkan produktivitas. Meningkatkan produktivitas disini mencakup sistem informasi dan kualitas sumber daya manusia.
2. Reformasi sistem regulasi
3. Membangun peluang-peluang internasional
4. Memperbaiki iklim bisnis untuk menjalankan Foreign Direct Investment (FDI). (Japan Gov, 2018)

Abenomics terbukti berhasil menjadi salah satu kebijakan politik luar negeri Jepang melalui kekuatan ekonomi di era Perdana Menteri Shinzo Abe yang banyak memberikan keuntungan bagi Jepang, diantaranya:

1. Perjanjian perdagangan bebas terus meningkat
2. Investasi di bidang proyek infrastruktur terus meningkat karena pemerintah mendukung para investor.

TICAD SEBAGAI ALAT POLITIK.

Pada tahun 1980, dalam dokumen "*Report on the Concept of National Comprehensive Security*", Jepang untuk pertama kalinya mendefinisikan konsep keamanan nasionalnya secara lebih luas. Dalam konteks ini, keamanan energy (energy security) menjadi isu sentral dari para pengambil kebijakan Jepang. Hal tersebut tidak terlalu mengherankan karena sekitar 80% kebutuhan energy Jepang harus diimpor dari negara lain sehingga menyiratkan kondisi ketergantungan yang signifikan karena Jepang merupakan negara yang miskin akan sumber daya alam. Karena tidak memiliki sumber daya alam khususnya minyak bumi dan gas untuk mendukung industrinya ditambah dengan kebocoran reaktor nuklir Fukushima pada 2011, ketahanan energi merupakan prioritas utama bagi Jepang dan membuat Jepang melakukan beberapa investasi besar dalam proyek minyak dan gas di seluruh Afrika karena Afrika memiliki apa yang Jepang butuhkan.

Persaingan kedua negara pun berlanjut sampai ke Afrika. Pada tahun 1993 Jepang menginisiasi kerjasama dengan Afrika melalui Tokyo International Conference On African Development (TICAD). Tujuh tahun kemudian tepatnya pada tahun 2000 China membentuk forum kerjasama serupa yang diberi nama Forum On China-Africa

Cooperation (FOCAC). FOCAC pun menjadi alasan mengapa pemerintah Jepang mempercepat pelaksanaan TICAD dari awalnya lima tahun sekali menjadi tiga tahun sekali sejak tahun 2013.

Dalam pidatonya, Perdana Menteri Shinzo Abe juga secara terang-terangan menyebutkan bahwa kualitas baik barang maupun infrastruktur Jepang lebih baik dari kualitas China. Ini dikarenakan infrastruktur China dinilai memiliki kualitas yang rendah dan Jepang langsung menawarkan kualitas infrastruktur mereka yang lebih baik. (Japan Times, 2018)

Jepang juga beranggapan bahwa Dewan Keamanan PBB tidak melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik karena dirasa kurang demokratis. Dari segi keanggotaan dan pemungutan suara pun, negara-negara yang duduk di kursi anggota tetap Dewan Keamanan yang memiliki wewenang dan kuasa penuh, apalagi ditambah dengan hak veto yang dimilikinya. Kehadiran anggota tidak tetap yang dirotasi setiap dua tahun sekali menurut regional dirasa tidak berpengaruh banyak karena pengambilan keputusan akhir ada di tangan anggota tetap Dewan Keamanan PBB yang merupakan negara para pemenang Perang Dunia II.

Permasalahan reformasi Dewan Keamanan PBB juga dibawa Jepang di forum kerjasamanya dengan Afrika yaitu TICAD. Dalam pidatonya Shinzo Abe mengatakan bahwa dalam tubuh Dewan Keamanan PBB perlu adanya reformasi, untuk itu negara-negara di Afrika dan Asia dinilai perlu untuk mengirimkan perwakilannya seperti yang disebutkan Shinzo Abe dalam pidatonya, "Africa should send a permanent member to the U.N. Security Council by 2023". (Asia Nikkei, 2018) Karena selama ini negara-negara

dari kawasan Asia dan Afrika dinilai kurang dipandang dan di dengar suaranya. Dalam kesempatan itu pula Jepang secara terang-terangan mengutarakan keinginannya untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Usaha Jepang untuk melakukan reformasi di tubuh Dewan Keamanan PBB telah dilakukan sejak tahun 2013. Jepang dibawah Perdana Menteri Shinzo Abe telah menanggapi isu reformasi Dewan Keamanan PBB ini secara serius. Terbukti pada tahun 2013 saat berlangsungnya TICAD V, Perdana Menteri Shinzo Abe mengadakan “Japan-African Summit Meeting on UN Security Council Reform”.

Dalam pidatonya, Perdana Menteri Abe menyatakan pandangan bahwa reformasi Dewan Keamanan PBB, yang merupakan agenda penting dan umum lainnya bagi negara-negara Jepang dan Afrika, adalah bagian besar yang hilang dalam reformasi pemerintahan global secara keseluruhan. Menyadari bahwa ini adalah pertemuan tingkat pertemuan pertama yang pernah ada antara Jepang dan Afrika yang berfokus pada reformasi Dewan Keamanan, dia menyatakan harapannya untuk lebih memperkuat kerjasama Jepang-Afrika mengenai reformasi Dewan Keamanan melalui pertemuan ini. Perdana Menteri Abe menyatakan bahwa Jepang dan Afrika, sebagai kekuatan pendorong reformasi, yang bertujuan untuk mewujudkan ekspansi baik dalam kategori permanen maupun tidak permanen, berbagi banyak elemen yang sama, dan bahwa Jepang ingin meningkatkan momentum untuk mewujudkan Dewan Keamanan reformasi melalui peningkatan kerjasama lebih lanjut dengan Afrika.

Sebagai tanggapan, pihak Afrika, termasuk Presiden Sierra Leone Dr. Koroma dan para pemimpin C-10 lainnya, mengucapkan terima kasih kepada Jepang untuk

mengadakan pertemuan semacam itu dan menjelaskan posisi dan kebijakan Afrika tentang reformasi Dewan Keamanan. Kedua pihak, dengan maksud untuk realisasi awal reformasi, menyetujui koordinasi dan kerjasama lebih lanjut antara Jepang dan negara-negara Afrika di ibu kota mereka dan melalui Misi mereka ke PBB. (MOFA, 2018)

KESIMPULAN.

Yang pertama berhubungan dengan ekonomi. Melalui TICAD, Jepang memiliki kepentingan untuk mencari sumber daya alam khususnya sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas. Ini terbukti dari beberapa kerjasama dan proyek yang dihasilkan Jepang melalui TICAD VI dimana banyak kerjasama dan proyek yang dihasilkan yang berkaitan dengan minyak bumi dan gas. Hal ini dikarenakan perekonomian Jepang yang telah memimpin ekonomi global sejak lama semakin berkembang yang mana di satu sisi membutuhkan energi yang besar untuk dapat terus menggerakkan industrinya. Sementara Jepang merupakan negara yang miskin akan sumber daya alam. Selain itu Jepang juga memanfaatkan Afrika sebagai pasar baru bagi perdagangan Afrika.

Adanya persaingan energi di dunia membuat Jepang sebagai negara yang membutuhkan tidak boleh ketinggalan. Krisis di Timur Tengah membuat persaingan energi antara negara-negara besar di dunia semakin jelas, hal ini membuat pemerintah Jepang tidak ingin ketinggalan dengan negara-negara lain dan tidak ingin ketinggalan kesempatan.

Percepatan pelaksanaan TICAD juga dilatarbelakangi oleh China. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh gencarnya forum-forum serupa yang dibuat oleh negara-negara lain, khususnya China. Seperti yang diketahui, China dan Jepang selalu bersaing dalam

banyak bidang. Puncaknya adalah ketika pada tahun 2000 ketika China membuat forum serupa dengan TICAD yang diberi nama FOCAC. Pemerintah Jepang di bawah Perdana Menteri Shinzo Abe langsung mempercepat pelaksanaan TICAD yang awalnya lima tahun sekali menjadi tiga tahun sekali untuk membendung pengaruh China di Afrika. Saat ini Jepang dan China berada pada urutan kedua dan ketiga perekonomian terbesar di dunia setelah Amerika Serikat. Perbedaan cara pandang dan sejarah di masa lalu menjadikan hubungan keduanya masih rentan sampai hari ini.

Yang terakhir adalah Jepang memanfaatkan TICAD sebagai forum untuk melancarkan politik luar negerinya. Melalui TICAD Jepang menyerukan adanya reformasi di tubuh Dewan Keamanan PBB karena Dewan Keamanan PBB dirasa kurang demokratis dalam menyelesaikan konflik-konflik yang ada di dunia. Tidak hanya disampaikan dalam pidato-pidatonya, Jepang juga membuat forum pada 2013 saat pelaksanaan TICAD V yang dihadiri oleh pemerintah Jepang, negara-negara perwakilan Afrika dan Dewan Keamanan PBB. Jepang menyuarakan pendapatnya dan berharap Jepang dan Afrika dapat mengirimkan perwakilannya untuk duduk di kursi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Jepang berharap Dewan Keamanan PBB dapat diisi oleh negara-negara perwakilan dari Asia dan Afrika. Keanggotaan anggota tetap Dewan Keamanan PBB juga di protes oleh negara-negara lain. Melalui TICAD, Jepang memanfaatkan forum yang telah berjalan selama 20 tahun lebih tersebut yang semakin berkembang baik partisipannya baik dari negara, organisasi internasional maupun negara donor.

Dalam melaksanakan politik luar negerinya tersebut, Jepang berpedoman pada prinsip dasar politik luar negerinya seperti yang disampaikan oleh Ministry Of Foreign Affairs (MOFA) yaitu diantaranya Menguatkan posisi Jepang di mata dunia internasional

khususnya untuk perekonomian yang stabil serta bersama masyarakat internasional menjaga perdamaian dan keamanan dunia sesuai dengan Konstitusi Jepang, melakukan kerjasama di bidang politik dan ekonomi untuk menghindari konflik, Jepang harus berperan aktif dan perdamaian dan keamanan internasional dan menjadikan ekonomi sebagai kekuatannya, diplomasi sebagai cara untuk mewujudkan tujuan politik luar negeri.

Tujuan politik luar negeri Jepang yang dimuat dalam MOFA pun telah dijadikan Jepang sebagai politik luar negerinya yang diwujudkan dalam TICAD, yaitu Mewujudkan perdamaian dan stabilitas keamanan di dunia khususnya di kawasan Asia, Jepang berupaya untuk memimpin perekonomian dunia dengan ekonomi yang stabil, Bersama International Energy Agency (IEA) Jepang berusaha memecahkan masalah energy dunia, dan bekerja sama dengan negara-negara berkembang.

Referensi

Asia Nikkei. (2014, Maret 14). *Japan's Seeks To Counter China's Influence In Africa*. Retrieved from Asia Nikkei : <https://asia.nikkei.com/Politics-Economy/Economy/Japan-s-Abe-seeks-to-counter-China-s-influence-in-Africa>.

Asia Nikkei. (2017). *Asean The Great Puzzle*. Retrieved from Asia Nikkei: <https://asia.nikkei.com/magazine/20160901-ASEAN-THE-GREAT-PUZZLE/Politics-Economy/Abe-raises-Japan-s-game-in-Africa?page=2>

Asia Nikkei. (2018, April 23). *Abe Raises Japans Game In Africa*. Retrieved from <https://asia.nikkei.com/Economy/Abe-raises-Japan-s-game-in-Africa>:
<https://asia.nikkei.com/Economy/Abe-raises-Japan-s-game-in-Africa>

Bisnis Liputan 6. (2017, December 18). *5 Negara Dengan Ekonomi Terbaik Di Dunia* . Retrieved from Bisnis Liputan 6: <http://bisnis.liputan6.com/read/3021277/5-negara-dengan-ekonomi-terbaik-di-dunia-mana-saja>.

- Japan Gov. (2018, April 4). *Abenomics*. Retrieved from Japan Gov:
<https://www.japan.go.jp/abenomics/index.html>
- Japan Times. (2017, Desember 22). *TICAD-Africa Initiative Sees Japan Pursue Bigger Slice Economic Pie*. Retrieved from Japan Times: <https://www.japantimes.co.jp/news/2016/08/09/reference/ticad-africa-initiative-sees-japan-pursue-bigger-slice-economic-pie/#.Wj00WDdx3IV>.
- Japan Times. (2018, April 24). *With TICAD, Japan Pursues African Growth And Export Markets*. Retrieved from Japan Times: <https://www.japantimes.co.jp/news/2016/08/09/reference/ticad-africa-initiative-sees-japan-pursue-bigger-slice-economic-pie/#.Wt73fRli3IW>
- MOFA. (2017, Desember 20). *Region Africa TICAD*. Retrieved from MOFA:
<http://www.mofa.go.jp/region/africa/ticad/outline.html>
- MOFA. (2018, April 4). *Basic Objectives Of Japan's Foreign Policy*. Retrieved from MOFA:
<http://www.mofa.go.jp/policy/other/bluebook/1978/1978-2.htm>.
- MOFA. (2018, April 23). *Japan Africa Summit Meeting On UN Security Council Reform*. Retrieved from MOFA: http://www.mofa.go.jp/policy/page3e_000059.html
- Republika. (2018, April 4). *5 Prinsip Politik Luar Negeri Jepang*. Retrieved from Republika:
<http://www.republika.co.id/berita/internasional/global/13/01/18/mgtmuw-abe-beberkan-lima-prinsip-politik-luar-negeri-jepang>.
- Riyanto, S. (2012). *Evolusi Sistem Pertahanan Jepang*. Yogyakarta: Prudent Media.
- TICAD 6. (2017, Desember 20). *TICAD 6*. Retrieved from TICAD 6: <https://ticad6.net/>
- United Nation. (2017, Oktober 18). *Africa-OSAA Partnerships*. Retrieved from United Nation:
<http://www.un.org/en/africa/osaa/partnerships/ticad.shtml>